



PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KELURAHAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG

Veny Apriyani¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan serius di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Kelurahan Babakan Ciparay mencatat prevalensi stunting cukup tinggi, yakni 31,1% pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan teori Ryaas Rasyid yang menyoroti tiga dimensi peran pemerintah: sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kelurahan telah berjalan tetapi belum optimal. Sebagai regulator, masih terdapat kendala pada aspek sosialisasi dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai dinamisator, pemerintah telah menggerakkan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan posyandu, namun partisipasi warga masih rendah karena kurangnya komunikasi dua arah. Sebagai fasilitator, kelurahan telah menyediakan layanan dasar seperti posyandu dan pemberian makanan tambahan, tetapi keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan layanan belum merata. Secara keseluruhan, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, serta penyediaan sarana dan fasilitas yang memadai agar upaya percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Stunting, Pemerintah Kelurahan, Peran, Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Abstract

Stunting remains a serious public health issue in Indonesia, including in Bandung City. Babakan Ciparay Subdistrict recorded a high stunting prevalence of 31.1% in 2024. This study aims to analyze the role of the Babakan Ciparay Village Government in accelerating stunting reduction, based on Ryaas Rasyid's theory of government roles which emphasizes three dimensions: as a regulator, a dynamizer, and a facilitator. The research employed a descriptive qualitative method through interviews, field observations, and documentation studies. The findings indicate that the village government's role has been implemented but remains suboptimal. As a regulator, there are challenges related to limited socialization and continuous evaluation. As a dynamizer, the government has mobilized the community through counseling and posyandu (integrated health post) activities, yet public participation remains low due to weak two-way communication. As a facilitator, the government has provided basic health services such as posyandu and supplementary feeding, but limited resources

and funding have hindered equitable access. Overall, strengthening cross-sectoral coordination, improving community education, and ensuring adequate facilities are essential to achieve effective and sustainable stunting reduction efforts.

Keywords: *Stunting, Sub-district Government, Role, Babakan Ciparay, Bandung City.*

PENDAHULUAN

Permasalahan stunting di Indonesia telah menjadi bagian dari perhatian pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada Pasal 66 ayat (4) disebutkan bahwa “Tata laksana gizi merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk perbaikan atau pemulihan pada gagal tumbuh, berat badan kurang, gizi kurang, gizi buruk, stunting, gizi berlebih, dan defisiensi mikronutrien serta masalah gizi akibat penyakit.” Hal ini menunjukkan bahwa stunting secara eksplisit masuk dalam masalah gizi yang harus ditangani oleh negara. Selain itu, Pasal 65 ayat (2) menegaskan bahwa “Upaya pemenuhan gizi dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada: a. ibu hamil dan menyusui; b. bayi dan balita; dan c. remaja perempuan.” Sementara itu, Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka keterpaduan dan akselerasi percepatan pemenuhan gizi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan intervensi dalam rangka pemenuhan dan perbaikan gizi.” Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa undang-undang ini menjadi dasar hukum penting dalam pelaksanaan berbagai program percepatan penurunan angka stunting, dengan melibatkan berbagai pihak secara terkoordinasi dan terpadu.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting stunting adalah pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang terjadi akibat kerungan gizi kronis serta infeksi berulang, keadaan ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Stunting memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan kognitif, menurunkan tingkat kecerdasan, serta memengaruhi produktivitas individu di usia dewasa. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu isu utama dalam bidang kesehatan yang saat ini mendapat perhatian serius dari

pemerintah Indonesia. Stunting, salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang masuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yakni mengakhiri kelaparan, mengatasi segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mewujudkan ketahanan pangan. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 mencapai 24%, namun Indonesia menargetkan angka stunting menurun hingga 14% pada tahun 2024 (Jannah Zahratul, 2023).

Gambar 1. 1 Grafik Angka Stunting



Sumber : Laporan Kerja Dinas Bandung 2022

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar dalam (Dinas Kesehatan Bandung, 2022), tahun 2017 angka stunting di Kota Bandung sebesar 25,8%. Angka ini sempat menurun menjadi 21,74%, namun kembali meningkat menjadi 28,12% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, prevalensi stunting di Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar 2,40% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 9.567 balita yang teridentifikasi mengalami stunting. Pada tahun 2021 angka stunting turun yaitu 1,34% dengan jumlah 7.568 balita. Data terbaru pada tahun 2023 menunjukkan bahwa angka stunting di Kota Bandung mencapai 16,3%. Meskipun demikian, Kota Bandung menargetkan untuk menurunkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sejalan dengan target prevalensi nasional.

Gambar 1. 2 Grafik Data Stunting Kelurahan Babakan Ciparay



Sumber: Laporan Kerja Kelurahan Babakan Ciparay 2024

Hasil data stunting yang didapatkan dari Kelurahan Babakan Ciparay Kota Bandung, jumlah kasus stunting mengalami perubahan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 terdapat 95 anak yang mengalami stunting, kemudian jumlahnya meningkat menjadi 113 anak pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 angka stunting menurun cukup signifikan menjadi 66 anak. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali hingga mencapai 115 anak, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dan pada tahun 2024, jumlah kasus stunting sedikit menurun menjadi 98 anak. Perubahan ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Kelurahan Babakan Ciparay masih belum terselesaikan sepenuhnya. Sebuah wilayah dapat dianggap bebas stunting jika prevalensi balita stunting di wilayah tersebut kurang dari 20%. Standar ini ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai target global untuk kondisi stunting.

Berdasarkan data jumlah balita di Kelurahan Babakan Ciparay, dari total 315 balita terdapat 98 anak yang mengalami stunting, sehingga prevalensi stunting mencapai 31,1%. Menurut parameter WHO, prevalensi tersebut masuk dalam kategori tinggi (30–39%). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Kelurahan Babakan Ciparay masih menjadi isu kesehatan masyarakat yang serius. Sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 126 hingga Pasal 128, dijelaskan bahwa kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota yang berada dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan penurunan angka stunting ini, Lurah bertanggung jawab kepada camat dan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat. Meskipun kelurahan tidak memiliki badan permusyawaratan seperti halnya desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun kelurahan tetap didukung oleh keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Karang Taruna yang membantu kelurahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, lurah juga bertugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang didelegasikan oleh bupati atau wali kota. Dengan demikian, kelurahan lebih menekankan pada fungsi administratif dan pelayanan publik dibandingkan dengan desa yang memiliki kewenangan otonom dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kota Bandung, kelurahan memiliki peran penting sebagai Lokasi pelaksanaan program. Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.607-Bappelitbang/2020 menetapkan kelurahan sebagai lokasi utama untuk program penurunan dan pencegahan stunting. Kelurahan ini memiliki tugas untuk melaksanakan program penurunan dan pencegahan stunting, termasuk mengidentifikasi anak-anak yang beresiko stunting, mengembangkan program intervensi gizi, dan memantau perkembangan anak-anak. Dengan demikian, kelurahan memiliki peran penting dalam menjalankan program penurunan dan pencegahan stunting di Kota Bandung serta memastikan bahwa program ini dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, ternyata angka stunting

di wilayah ini tergolong relative tinggi yaitu 98 anak yang terkena stunting dari jumlah anak 315. Peneliti juga melihat bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting masih rendah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham tentang faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Salah satu program yang dijalankan di Kelurahan Babakan Ciparay dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah Dapur Dashat Lumbung, yaitu program pemberian makanan tambahan (PMT) selama 28 hari bagi anak-anak yang mengalami stunting dan kurang gizi. Selain itu, diberikan juga susu khusus bagi ibu hamil yang memiliki ukuran lingkaran lengan atas kurang dari 23 cm, sebagai bentuk intervensi gizi.

Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay menangani stunting melalui kolaborasi dengan PT Suryaprana Nutrisindo: Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay bekerja sama dengan PT Suryaprana Nutrisindo untuk memberikan nutrisi tambahan bagi anak-anak stunting di wilayah tersebut. Bantuan ini berupa vitamin dan suplemen herbal yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat daya ingat, mendukung pertumbuhan gigi, serta menjaga kesehatan pencernaan dan nafsu makan anak-anak.

Pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah tingginya kepadatan penduduk akibat banyaknya pendatang dari luar wilayah. Hal ini menyebabkan jumlah balita yang datang ke Posyandu meningkat, sehingga perlu penanganan ekstra dari tim pelaksana. Kasus stunting paling banyak ditemukan di RW 06. Selain itu, bahwa program pencegahan stunting yang di jalankan oleh Kelurahan Babakan Ciparay juga masih belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dari kondisi lingkungan disana juga masih kurang mendukung dengan banyaknya rumah yang tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai sehingga bisa meningkatkan risiko penyakit seperti di Kelurahan Babakan Ciparay, masalah air bersih dan sanitasi masih menjadi persoalan serius.

Untuk menindaklanjuti program Pemerintah Kota Bandung dalam percepatan penurunan stunting, maka Lurah Babakan Ciparay menerbitkan Keputusan Lurah Babakan Ciparay Nomor. KB.01.02.02 Tahun 2024

Tentang Penetapan Tim Pendamping Keluarga Untuk Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Tingkat Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

Dalam perannya dalam percepatan penurunan angka stunting di Kelurahan Babakan Ciparay, Lurah Babakan Ciparay tidak turun tangan langsung, tetapi membentuk sebuah tim yaitu Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS) yang dipimpin oleh Lurah lalu dianggotai oleh kader posyandu. Kelurahan Babakan Ciparay juga bekerja sama dengan organisasi lain, seperti DPC Parkindo Bandung, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan stunting. Meskipun hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay, stunting masih tetap terjadi di wilayah Kelurahan Babakan Ciparay

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay dalam upaya penurunan angka stunting. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2017) yang menekankan pentingnya memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui proses eksplorasi, pengumpulan data dari partisipan, analisis induktif, dan penafsiran makna. Peneliti sebagai instrumen utama berperan aktif dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan serta menganalisis data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, yang dipilih karena relevansinya dengan program percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Lokasi ini menjadi fokus kajian karena memiliki peran strategis dalam pelaksanaan intervensi, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta edukasi gizi masyarakat. Jadwal penelitian

dilaksanakan mulai Desember 2024 hingga Juli 2025, meliputi tahapan studi pustaka, peninjauan lapangan, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai dimensi-dimensi peran pemerintah kelurahan sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah Babakan Ciparay.

PEMBAHASAN

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KELURAHAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG

Peran Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay dalam menurunkan angka stunting masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah ada beberapa program yang dijalankan. Hal ini terlihat dari fluktuasi angka stunting di Kelurahan Babakan Ciparay pada periode 2020–2024, yang sempat menurun pada tahun 2022 namun kembali meningkat pada tahun 2023 hingga mencapai 115 anak, sebelum turun sedikit pada tahun 2024 menjadi 98 anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah kelurahan belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan penguatan pada aspek regulasi, fasilitas, maupun partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini Peran Pemerintahan dianalisis dengan menggunakan teori Ryas Rasyid yang mencakup 3 dimensi penting yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator.

A. Regulator

Regulator menggambarkan peran pemerintah kelurahan sebagai pengatur dan pembuat aturan dalam upaya penurunan stunting. Sebagai regulator, kelurahan bertugas menyusun kebijakan, arahan, dan peraturan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pencegahan serta penanganan stunting di masyarakat. Dengan adanya regulasi, semua pihak yang terlibat memiliki pegangan yang jelas mengenai Langkah yang harus dilakukan. Melalui peran regulator, kelurahan juga dapat melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan yang sudah dijalankan. Jika ditemukan kendala

atau kekurangan, kelurahan, bisa menyesuaikan kebijakan agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, fungsi regulator bukan hanya mengatur, tetapi juga menjamin keberlangsungan program penurunan stunting secara berkesinambungan.

Arahan pelaksana, dalam program penurunan stunting di Kelurahan Babakan Ciparay berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan, diketahui bahwa kelurahan berperan sebagai pelaksana teknis, bukan pembuat kebijakan. Seluruh arahan yang dijalankan mengacu pada regulasi dan peraturan wali kota. Dalam pelaksanaannya, kelurahan berfokus pada kegiatan monitoring dan pendampingan melalui kader posyandu maupun PKK yang bertugas mencatat perkembangan anak dan melaporkannya secara berkala. Dengan demikian, arahan pelaksana membantu memastikan agar program penanganan stunting berjalan sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dianalisis bahwa pola arahan pelaksana di Kelurahan Babakan Ciparay bersifat hierarkis, di mana kebijakan utama berasal dari pemerintah kota, sedangkan kelurahan bertindak sebagai unit implementatif di lapangan. Namun, analisis peneliti menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro dengan kebutuhan mikro masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kader memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan. Mereka berperan penting dalam menyesuaikan pelaksanaan program agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif.

Penyesuaian keputusan, dalam program penurunan stunting di Kelurahan Babakan Ciparay menunjukkan kemampuan pemerintah kelurahan dalam mengadaptasi kebijakan dari tingkat kota agar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Babakan Ciparay, diketahui bahwa proses adaptasi dilakukan dengan menyesuaikan

setiap arahan dari pemerintah kota agar dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah dengan mengarahkan program kader posyandu untuk lebih fokus pada edukasi gizi keluarga dan pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa Kelurahan Babakan Ciparay memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah kota dan kebutuhan masyarakat. Struktur koordinasi yang melibatkan lurah, sekretaris, kasi kesejahteraan sosial, dan kader posyandu menciptakan sistem implementasi yang adaptif dan kontekstual. Dengan adanya penyesuaian keputusan ini, program penanganan stunting menjadi lebih efektif karena kebijakan yang diterapkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki peran substantif dalam memastikan program penurunan stunting berjalan sesuai dengan realitas lapangan.

B. Dinamisator

Dimensi Dinamisator menekankan peran sebuah Lembaga sebagai penggerak atau motor yang mendorong keterlibatan pihak lain dalam suatu program. Fungsi utamanya adalah menciptakan energi social sehingga semua elemen yang terlibat lebih bersemangat dan mau berpartisipasi. Dengan kata lain, peran ini menekankan pada bagaimana menghidupkan suasana kolaborasi agar program dapat berjalan dinamis. Sebagai dinamisator, kelurahan bertugas membangun komunikasi yang efektif, menyebarkan informasi, dan memotivasi masyarakat atau kelompok sasaran agar aktif berperan serta. Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi berbagai pihak ketika terjadi hambatan dalam proses kegiatan.

Komunikasi, dalam program pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Babakan Ciparay berperan penting sebagai sarana penyampaian informasi dari pemerintah kelurahan dan kader posyandu kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi dilakukan melalui berbagai cara, baik formal maupun nonformal. Lurah secara rutin mengadakan pertemuan bulanan bersama kader dan keluarga yang anaknya terdampak stunting untuk menyampaikan informasi sekaligus menampung keluhan masyarakat. Sekretaris kelurahan bertanggung jawab memastikan informasi resmi tersampaikan melalui surat undangan maupun grup WhatsApp perangkat kelurahan. Sementara itu, Kasie Kesejahteraan Sosial berperan sebagai penghubung antara kelurahan dan kader dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan seperti pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta bantuan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan analisis peneliti, pola komunikasi di Kelurahan Babakan Ciparay bersifat kombinatif, yaitu memadukan komunikasi digital, tatap muka, dan komunikasi berbasis kearifan lokal. Masing-masing saluran memiliki kelebihan dan keterbatasannya, namun kombinasi berlapis ini membuat penyebaran informasi lebih merata dan efektif. Pertemuan rutin di kelurahan tetap menjadi media komunikasi paling optimal karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara aparat kelurahan, kader, dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang partisipatif, terbuka, dan berkesinambungan, hubungan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat semakin harmonis sehingga program penurunan stunting dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Partisipasi, masyarakat dalam program pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Babakan Ciparay menunjukkan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah kelurahan, kader posyandu, hingga masyarakat sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, lurah berperan sebagai penggerak utama yang mendorong seluruh elemen wilayah seperti puskesmas, RT/RW, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu serta edukasi gizi. Sekretaris

lurah berkontribusi dalam memastikan validitas data anak balita dan ibu hamil agar program bantuan dan sosialisasi berjalan tepat sasaran. Sementara itu, Kasie Kesejahteraan Sosial memantau pelaksanaan program sosial seperti pemberian makanan tambahan dan bantuan gizi, sedangkan kader posyandu menjadi pelaksana utama di lapangan yang berinteraksi langsung dengan ibu-ibu serta memberikan penyuluhan dan pendampingan secara rutin. Berdasarkan analisis peneliti, partisipasi masyarakat di Kelurahan Babakan Ciparay terbentuk melalui kolaborasi multi-level antara pemerintah kelurahan, kader, dan warga. Lurah berperan sebagai pengarah kebijakan, sekretaris dan kasie kesos menjamin dukungan administratif serta koordinasi, sementara kader menjadi penghubung utama antara kebijakan dan masyarakat. Meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya konsistensi kehadiran warga dan keterbatasan ekonomi, inisiatif kader dalam melakukan pendekatan personal mampu menjaga keberlangsungan partisipasi. Secara keseluruhan, pola partisipasi di Babakan Ciparay bersifat partisipatif dan gotong royong, mencerminkan kesadaran kolektif bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama. Dengan penguatan kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan, partisipasi masyarakat ini berpotensi besar meningkatkan efektivitas program penurunan stunting di wilayah tersebut.

C. Fasilitator

Dimensi fasilitator merujuk pada peran sebuah Lembaga dalam menyediakan dukungan, baik berupa sarana dan prasarana maupun pendampingan yang diperlukan dalam suatu program. Sebagai fasilitator, fungsi utamanya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat atau kelompok sasaran untuk dapat menjalankan peran mereka secara efektif. Peran fasilitator biasanya diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas fisik maupun non-fisik. Dengan adanya dukungan ini, hambatan yang dihadapi masyarakat dapat diminimalisasi sehingga mereka lebih mudah beradaptasi. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang

kondusif bagi pelaksanaan kegiatan dengan menjembatani berbagai kepentingan guna mengoptimalkan hasil pembangunan. Dalam posisi ini, pemerintah bertugas memberikan kemudahan serta membuka akses terhadap sumber-sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Pada dasarnya, fasilitator merupakan pihak yang membantu masyarakat menyusun rencana untuk mencapai tujuan bersama, tanpa berpihak atau mengambil posisi tertentu dalam proses diskusi.

Sarana dan prasarana, di Kelurahan Babakan Ciparay menjadi pondasi penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting. Pemerintah kelurahan telah berupaya memaksimalkan fasilitas yang tersedia, seperti alat ukur tinggi dan berat badan, timbangan digital, serta program Dapur Sehat (Dasyat) yang menyediakan makanan tambahan bagi anak stunting. Lurah berperan sebagai koordinator utama dalam memastikan fasilitas berfungsi optimal, sementara sekretaris lurah berperan dalam administrasi dan pengusulan kebutuhan ke Musrenbang. Kasie kesejahteraan sosial turut berperan dalam memastikan bantuan sosial dan dukungan gizi tersalurkan dengan tepat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan bahwa sarana dan prasarana bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bentuk nyata dari tanggung jawab sosial pemerintah kelurahan terhadap kesehatan masyarakat. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat dianalisis bahwa penyediaan sarana dan prasarana di Babakan Ciparay telah berjalan dengan baik namun belum merata. Pemerintah kelurahan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan sumber daya, termasuk melalui dukungan CSR dan sinergi dengan puskesmas. Kader posyandu menjadi jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi lapangan. Meskipun terdapat keterbatasan fasilitas, tingginya komitmen dan antusiasme para pelaksana menunjukkan potensi besar untuk peningkatan kualitas layanan. Analisis ini menegaskan bahwa penguatan sarana dan prasarana secara berkelanjutan, disertai koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas kader, akan

menjadi faktor penentu keberhasilan program penurunan stunting di Kelurahan Babakan Ciparay.

Pelatihan, menjadi aspek penting dalam upaya peningkatan kapasitas kader dan masyarakat di Kelurahan Babakan Ciparay untuk menekan angka stunting. Pemerintah kelurahan bersama puskesmas rutin menyelenggarakan pelatihan yang mencakup pengetahuan gizi, teknik pengukuran tumbuh kembang anak, serta strategi komunikasi efektif dalam penyuluhan. Lurah berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani kerja sama lintas pihak, sementara sekretaris lurah mengatur jadwal dan koordinasi pelatihan agar kegiatan berjalan sistematis. Kasie kesejahteraan sosial memastikan kegiatan ini melibatkan seluruh pihak yang relevan, sehingga manfaat pelatihan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah kelurahan dalam memperkuat kompetensi kader sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Dari hasil wawancara dan observasi, dapat dianalisis bahwa pelatihan berperan sentral dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting di Babakan Ciparay. Kelurahan berfungsi sebagai fasilitator dan penggerak kebijakan, puskesmas sebagai sumber keahlian teknis, kader sebagai pelaksana lapangan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat yang aktif berpartisipasi. Pendekatan kolaboratif ini memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas kader berdampak langsung terhadap keberhasilan program, terutama dalam deteksi dini, penyuluhan gizi, dan pemberian intervensi yang tepat. Program seperti Dapur Sehat (Dasyat), PMT, dan kebun gizi menjadi contoh adaptasi lokal yang efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Analisis ini menegaskan bahwa keberlanjutan pelatihan dan pendampingan berbasis potensi lokal menjadi kunci utama dalam memperkuat peran kelurahan sebagai motor penggerak percepatan penurunan stunting.

FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KELURAHAN BABAKAN CIPARAY

Faktor-faktor yang menghambat upaya penurunan angka stunting di Kelurahan Babakan Ciparay mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Dalam dimensi regulator, hambatan utama terletak pada lemahnya implementasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga pelaksana. Meskipun telah ada kebijakan seperti pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan program Dapur Dashat Lumbung, namun sosialisasi kepada masyarakat belum berjalan optimal. Banyak warga yang belum memahami maupun mengetahui kebijakan terkait stunting. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala serius karena dana kelurahan lebih difokuskan pada pembangunan fisik, sementara kegiatan nonfisik seperti pelatihan kader, sosialisasi gizi, dan evaluasi kebijakan kurang mendapat dukungan memadai. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan tidak dapat diukur secara objektif dan berkesinambungan.

Pada dimensi dinamisator, hambatan terbesar muncul dari rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kesadaran kolektif tentang pentingnya pencegahan stunting. Banyak masyarakat masih memiliki pemahaman keliru, menganggap stunting hanya faktor keturunan, bukan akibat kekurangan gizi kronis. Hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan edukatif yang dilakukan oleh kelurahan atau puskesmas. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah belum efektif, karena masih bersifat satu arah dan formal sehingga tidak menarik perhatian masyarakat. Koordinasi antar lembaga sosial seperti PKK, Karang Taruna, dan Posyandu juga belum berjalan terpadu, sehingga belum tercipta sinergi dalam kegiatan pencegahan stunting.

Dari sisi sosial ekonomi, banyak keluarga di Babakan Ciparay berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menghambat pemahaman tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, pola makan sehat, dan sanitasi yang

baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah sebagai penggerak (dinamisator) masih terbatas oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat. Ketimpangan sosial ini memperkuat tantangan dalam menumbuhkan kesadaran kolektif untuk ikut serta dalam program penurunan stunting.

Sedangkan dalam dimensi fasilitator, hambatan terlihat pada keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Beberapa posyandu belum memiliki alat ukur pertumbuhan yang lengkap, bahkan ada wilayah yang tidak memiliki posyandu aktif sehingga kegiatan dilakukan di tempat seadanya. Jumlah kader posyandu yang aktif juga sedikit dan sebagian sudah berusia lanjut, membuat kegiatan pendampingan tidak maksimal. Di sisi lain, keterbatasan anggaran membatasi kelurahan dalam pengadaan alat, bahan makanan tambahan, dan penyuluhan gizi berskala luas. Lingkungan permukiman yang padat serta akses air bersih yang belum merata juga memperburuk kondisi kesehatan anak. Hambatan ini memperlihatkan bahwa peran kelurahan sebagai fasilitator masih terkendala faktor administratif, struktural, dan lingkungan yang saling memengaruhi efektivitas penanganan stunting di Babakan Ciparay.

UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KELURAHAN BABAKAN CIPARAY

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay dalam menurunkan angka stunting mencakup berbagai langkah strategis pada tiga dimensi utama, yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator. Dalam dimensi regulator, kelurahan berupaya memperkuat perannya melalui peningkatan koordinasi lintas sektor bersama puskesmas dan kader posyandu. Pertemuan rutin dilakukan untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan stunting. Pemerintah kelurahan juga menerbitkan Surat Keputusan Lurah guna memperjelas pembagian tugas antar pihak terkait. Selain itu, kelurahan aktif melakukan sosialisasi kebijakan dalam forum warga seperti musyawarah RT/RW dan kegiatan kader agar masyarakat lebih memahami dan mendukung program stunting.

Pengawasan dilakukan secara partisipatif, serta sebagian dana kelurahan mulai dialokasikan untuk kegiatan nonfisik seperti penyuluhan gizi dan pelatihan kader agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak di lapangan.

Dalam dimensi dinamisator, pemerintah kelurahan berfokus pada peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan yang lebih edukatif dan menarik. Penyuluhan gizi kini dikemas dalam bentuk pelatihan memasak menu sehat, lomba balita sehat, dan diskusi terbuka bersama ibu hamil dan menyusui. Kader posyandu juga didorong menjadi agen perubahan sosial yang aktif memberikan edukasi langsung kepada warga. Untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, kelurahan mengadakan pelatihan kader gizi dan posyandu dengan dukungan puskesmas, sehingga pendampingan kepada masyarakat lebih efektif. Pendekatan yang partisipatif ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar terlibat aktif dalam program pencegahan stunting secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam dimensi fasilitator, Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay berupaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Kerja sama dengan puskesmas dilakukan dalam penyediaan tenaga medis, alat kesehatan, serta dukungan kegiatan posyandu. Melalui program Dapur Dashat Lumbung, masyarakat diberi ruang untuk belajar mengenai gizi, makanan tambahan, dan pengolahan bahan pangan sehat. Kelurahan juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial guna mendapatkan bantuan fasilitas serta pendanaan bagi kegiatan kesehatan. Berbagai alat pendukung seperti timbangan bayi, buku KIA, dan media edukasi gizi juga mulai disediakan untuk menunjang kegiatan posyandu.

Selain aspek kesehatan, kelurahan turut memperhatikan faktor lingkungan dengan melaksanakan kampanye kebersihan dan sanitasi. Warga dilibatkan dalam kegiatan kerja bakti dan penyediaan sarana air bersih sederhana untuk menciptakan lingkungan sehat. Upaya-upaya fasilitasi ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay tidak hanya berfokus pada peningkatan layanan kesehatan, tetapi juga berupaya memperkuat faktor penunjang seperti kebersihan lingkungan, ketersediaan air bersih, dan ketahanan pangan keluarga sebagai bagian integral dari strategi pencegahan stunting yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay telah berupaya menjalankan perannya dalam penurunan angka stunting sesuai dengan tiga dimensi peran pemerintah, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam dimensi regulator, kelurahan telah menunjukkan komitmen kelembagaan melalui penerbitan kebijakan dan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memperkuat pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Namun, upaya ini masih terbatas oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum adanya sistem evaluasi yang berkelanjutan. Pada dimensi dinamisator, kelurahan berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan gizi, kampanye hidup sehat, serta pelaksanaan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang menyediakan makanan tambahan bagi balita stunting dan ibu hamil gizi kurang. Meskipun demikian, rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya partisipasi dalam kegiatan posyandu, dan masih kuatnya faktor budaya seperti pernikahan dini menjadi hambatan yang cukup besar. Sementara itu, dalam dimensi fasilitator, kelurahan telah berupaya menyediakan berbagai sarana dan layanan pendukung seperti posyandu, bantuan gizi, serta fasilitas kesehatan dasar, namun kapasitas dan jangkauannya masih terbatas akibat kepadatan penduduk, keterbatasan anggaran, dan kondisi lingkungan yang kurang sehat. Secara keseluruhan, peran Pemerintah Kelurahan Babakan Ciparay dalam penurunan angka stunting sudah berjalan sesuai fungsi pemerintahan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat agar program pencegahan dan penanggulangan stunting dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, W. John. 2017. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Kesehatan Bandung. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*.

Jannah, Zahratul. (2023). Penanganan Stunting Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Pada Dinas Kesehatan Aceh.

Kemenkes. (2018). STUNTING : KEMENKES.<https://Ayosehat.Kemkes.Go.Id/Topik-Penyakit/Defisiensi-Nutrisi/Stunting>.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). Buka Rakornas Stunting, Wapres Ungkap Keberhasilan Pemerintah Turunkan Prevalensi Lima Tahun Terakhir.https://www.setneg.go.id/baca/index/buka_rakornas_stunting_wapres_ungkap_keberhasilan_pemerintah_turunkan_prevalensi_lima_tahun_terakhir

Rokom. (2023). Prevalensi Stunting Di Indonesia Turun Ke 21,6% Dari 24,4%.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.607-Bappelitbang/2020 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Untuk Program Penurunan Dan Pencegahan Stunting di Kota Bandung.